

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Penulisan dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan pustaka untuk mendeskripsikan konsep dasar dari variabel yang diteliti serta membahas kerangka pemikiran yang menjelaskan tentang model variabel, selanjutnya diikuti dengan menjelaskan penelitian terdahulu dan hipotesis yang diajukan.

2.1.1 Kemiskinan

Kemiskinan adalah situasi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar akibatnya kurang mampu untuk menjalani keberlangsungan hidupnya. Situasi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan yang mendasar contohnya seperti sandang, pangan papan serta akses pendidikan dan kesehatan.

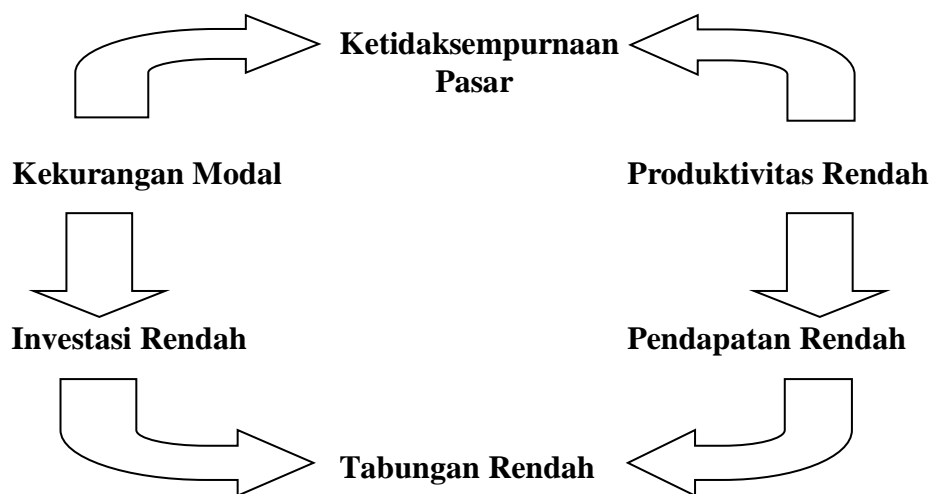
Menurut Mudrajat Kuncoro (2006) mengidentifikasi penyebab kemiskinan yang dipandang dari sisi ekonomi sebagai berikut:

1. Secara mikro, kemiskinan diakibatkan karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menyebabkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan disebabkan adanya perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada akhirnya upahnya rendah. Rendahnya

kualitas sumber daya manusia ini salah satunya diakibatkan karena rendahnya seseorang dalam mengakses jenjang pendidikan.

3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal untuk menunjang pembangunan.

Ketiga kemiskinan tersebut bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas dan akses untuk orang dalam menunjang pendidikan yang tinggi. Rendahnya pendidikan dan skill dan dimiliki mengakibatkan kurangnya produktivitas lalu akan mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan juga akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi untuk melakukan pembangunan salah satunya dalam pengadaan infrastruktur. Kemudian rendahnya investasi akan menyebabkan keterbelakangan dan seterusnya. Berikut merupakan gambar lingkaran setan kemiskinan (*The Vicious Circle of Poverty*).



Gambar 2.1
Lingkaran Setan Kemiskinan (*The Vicious Circle of Poverty*)

Menurut Nurkse dalam Kuncoro (2015) menyatakan lingkaran setan kemiskinan merupakan deretan melingkar dari kekuatan yang satu sama lain berkaitan dalam beraksi dan bereaksi sedemikian rupa yang menjadikan negara miskin atau orang miskin tetap berada dalam keadaan tidak sejahtera. Karena seseorang atau sekelompok masyarakat dalam keadaan miskin, maka produksi mereka rendah, produksi yang rendah akan menyebabkan pendapatannya pun rendah, ketika pendapatan yang diterima rendah mengakibatkan daya beli rendah, selanjutnya apabila daya beli yang rendah menimbulkan kekurangan kapital, dengan adanya kekurangan kapital maka investasi akan rendah, dengan demikian investasi yang rendah berarti produksi atau untuk pemodalan dalam pengadaan fasilitas infrastruktur yang masuk akan rendah rendah, produksi dan pengadaan fasilitas yang rendah akan berdampak pada kemiskinan. Dengan kata lain miskin menyebabkan miskin.

2.1.1.1 Teori Kemiskinan Ekstrem

Menurut United Nations (1995) kemiskinan ekstrem merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, minum air bersih, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses layanan sosial. Kondisi ini tidak hanya terbatas pada pendapatan tetapi juga pada kemampuan untuk mendapatkan akses layanan sosial.

Sedangkan menurut Todaro dan Smith (2006) Kemiskinan absolut (*Absolute Poverty*) atau disebut juga kemiskinan ekstrem diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan seseorang atau nyaris tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan pokok, pakaian, tempat tinggal yang layak dan kesehatan minimum. tinggi

rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua faktor utama, yakni: tingkat pendapatan nasional rata-rata, dan lebar sempitnya kesenjangan distribusi pendapatan. Konsep ini menjelaskan bahwa, perubahan garis kemiskinan akan terjadi apabila tingkat hidup masyarakatnya berubah (Todaro dan Smith, 2006).

2.1.1.2 Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Ekstrem

Menurut Todaro dan Smith (2006), kemiskinan absolut atau kemiskinan ekstrem yang terjadi di negara-negara berkembang diakibatkan oleh interaksi antara 6 karakteristik berikut:

1. Tingkat pendapatan nasional negara-negara berkembang terbilang rendah, dan laju pertumbuhan ekonominya tergolong lambat.
2. Pendapatan perkapita negara-negara Dunia Ketiga juga masih rendah dan pertumbuhannya amat sangat lambat, bahkan ada beberapa yang mengalami stagnasi.
3. Distribusi pendapatan sangat timpang atau sangat tidak merata
4. Mayoritas penduduk di negara-negara Dunia Ketiga harus hidup di bawah tekanan kemiskinan absolut.
5. Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi dan banyaknya wabah penyakit sehingga tingkat kematian bayi di negara-negara Dunia Ketiga sepuluh kali lebih tinggi dibanding dengan yang ada di negara maju.
6. Fasilitas pendidikan di kebanyakan negara-negara berkembang maupun isi kurikulumnya relatif masih kurang relevan maupun kurang memadai.

2.1.1.3 Ukuran Kemiskinan Ekstrem

Dalam menghitung garis kemiskinan ekstrem di Indonesia BPS melakukan pemindahan nilai US \$1,90 (*Purchasing Power Parity/PPP*) kedalam satuan rupiah. Hasil perhitungan ini yang dijadikan dasar penetapan penduduk yang masuk kepada golongan miskin ekstrem di Indonesia sejak dikeluarkan penetapan nilai tersebut oleh *World bank* (2019).

Sedangkan menurut BPS (2019) metode yang digunakannya dalam penghitungan penduduk miskin yang dilakukan sejak pertama kali hingga saat ini menggunakan pendekatan yang sama yaitu pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Ukuran Garis Kemiskinan (GK) yaitu suatu ukuran yang menyatakan besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan non makanan, atau standar yang menyatakan batas seseorang dikatakan miskin bila dipandang dari sudut konsumsi. GK adalah penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GNKM).

Menurut BPS (2010), penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat yaitu dengan masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari itu berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan.

Ukuran kemiskinan juga dapat dihitung melalui pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan untuk mengukur kemiskinan ini mengasumsikan bahwa seseorang dan rumah tangga dikatakan miskin jika pendapatan atau konsumsi

minimumnya berada di bawah garis kemiskinan. Ukuran-ukuran kemiskinan ini dihitung menurut Coudouel dalam artikel (Putrakunto, 2009) adalah:

1. *Head Count Index*

Head Count Index ini menghitung persentase orang yang berada di bawah garis kemiskinan dalam kelompok masyarakat tertentu.

2. *Sen Poverty Index*

Sen Poverty Index memasukkan dua faktor yaitu koefisien Gini dan rasio H. Koefisien Gini mengukur kesenjangan antara orang miskin. Apabila salah satu faktor-faktor tersebut naik, tingkat kemiskinan bertambah besar diukur dengan S.

3. *Poverty Gap Index*

Poverty Gap Index mengukur besarnya distribusi pendapatan orang miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

4. *Foster-Greer-Torbecke Index*

Seperti Indeks-indeks di atas, indeks FGT ini sensitif terhadap distribusi jika $\alpha > 1$. Bagian $(Z - Y_i/Z)$ adalah perbedaan antara garis kemiskinan (Z) dan tingkat pendapatan dari kelompok ke-i keluarga miskin (Y_i) dalam bentuk suatu presentase dari garis kemiskinan.

2.1.2 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah mengindikasikan semakin tingginya tingkat pendidikan yang dicapai oleh seseorang di suatu daerah. Angka rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang diselesaikan oleh seseorang

dalam menjalankan pendidikan formal. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah artinya semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditekuni. Pernyataan ini berlaku secara umum bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kualitas seseorang, baik pola pikir maupun pola tindakannya.

Todaro dan Smith (2006) bahwa pendidikan adalah hal yang mendasar untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Pendidikan menjadi peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga dapat menanggulangi kemiskinan yang terjadi. Rata-rata lama sekolah yaitu rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk Indonesia dijenjang pendidikan formal yang diikuti.

Menurut Todaro (2006), tingkat penghasilan ini dipengaruhi oleh seberapa lama seseorang menjalani pendidikan. Rata-rata lama sekolah adalah indikator tingkat pendidikan di suatu daerah. Pendidikan merupakan salah satu bentuk modal manusia (*human capital*) yang menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Investasi dalam modal manusia akan terlihat lebih banyak manfaatnya apabila kita bandingkan antara total biaya pendidikan yang digunakan selama menjalani pendidikan terhadap pendapatan yang nantinya akan didapatkan ketika sudah siap bekerja. Orang-orang yang berpendidikan tinggi akan memulai kerja penuh waktunya pada usia yang lebih tua, namun pendapatan mereka akan cepat naik dari pada orang yang bekerja lebih awal (Todaro, 2000).

Tobing (dalam Hastarini, 2005), mengemukakan bahwa orang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, diukur dengan lamanya waktu untuk sekolah akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibanding dengan orang yang pendidikannya lebih rendah.

2.1.2.1 Ukuran Rata Rata Lama Sekolah

Tingkat pendidikan dapat digambarkan secara keseluruhan merupakan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas. *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 telah menyusun angka rata-rata lama sekolah dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka itu bisa digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi pembangunan manusia dan perencanaan program wajib belajar nasional. Rata-rata lama sekolah yaitu perhitungan rata-rata jumlah tahun yang telah diselesaikan dan dicapai oleh penduduk pada seluruh jenjang pendidikan formal. Angka rata-rata lama sekolah menggambarkan kualitas pendidikan dalam suatu wilayah masyarakat tertentu. Rata-rata lama sekolah dapat diukur dengan menggunakan variabel partisipasi, tingkat atau kelas yang sedang atau pernah dijalani dan ijazah terakhir yang dimiliki. Perhitungan rata-rata lama sekolah di hitung dari penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.

Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) atau *Mean Years of Schooling* (MYS) sebagai berikut:

$$MYS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{Lama Sekolah penduduk}$$

Keterangan:

MYS : *Mean Years of Schooling*

n : Jumlah Penduduk

i : Suatu Wilayah (1,2,3..., *n*)

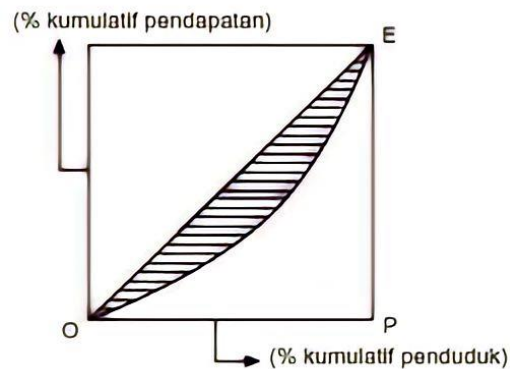
Rencana yang telah dibuat oleh pemerintah dalam mengupayakan pendidikan masyarakat adalah dengan adanya program wajib belajar 12 tahun untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada masyarakat atau peserta didik pada tingkat SMA/SMK/MA/Sederajat.

2.1.3 Gini Ratio

Ketimpangan pendapatan merupakan distribusi yang tidak proposional dari pendapatan nasional total yang diterima setiap individu atau berbagai rumah tangga dalam negara. Apabila ekonomi suatu negara berkembang dengan cepat, akan terjadi masalah ketimpangan pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sebagian besar penduduk memiliki pendapatan rendah, dan sebagian kecil penduduk memiliki pendapatan yang tinggi. Dengan kata lain, perbedaan jumlah pendapatan yang lebih besar antar lapisan dalam masyarakat hanya dapat dirasakan oleh golongan tertentu saja.

Para ahli ekonom umumnya membagi dua ukuran pokok distribusi pendapatan, yang keduanya digunakan dengan tujuan analisis dan kuantitatif. Kedua ukuran tersebut merupakan ukuran distribusi pendapatan, yakni besar atau

kecilnya bagian pendapatan yang diterima masing-masing orang (diukur menggunakan metode Kurva Lorenz, Koefisien Gini) (Sirojuzilam, 2010).



Gambar 2.2 Kurva Lorenz

Dalam Kurva Lorenz, Garis Diagonal OE adalah garis pemerataan sempurna karena setiap titik pada garis tersebut menunjukkan persentase penduduk yang sama dengan persentase penerimaan pendapatan. Koefisien Gini merupakan perbandingan antara luas bidang A dan luas segitiga OPE. Semakin jauh jarak garis Kurva Lorenz dari garis pemerataan sempurna, semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya, dan sebaliknya.

Pada kasus ekstrem, jika pendapatan didistribusikan secara merata, semua titik akan terletak pada garis diagonal dan daerah A akan bernilai nol. Sebaliknya pada ekstrem lain, bila hanya satu pihak saja yang menerima seluruh pendapatan, luas A akan sama dengan luas segitiga sehingga angka koefisien Gininya adalah satu (1). Jadi suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai koefisien gininya mendekati satu.

Gini Ratio merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Rumus Gini

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n P_i (F_i + F_{i-1})$$

ratio adalah sebagai berikut:

Dimana:

GR = Gini Ratio

n = Jumlah individu atau kelompok dalam populasi

P_i = Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke- i

F_i = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke- i

F_{i-1} = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-
($i-1$)

Gini ratio didasarkan pada kurva Lorenz, merupakan sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

2.1.3.1 Faktor Penyebab Terjadinya Ketimpangan

Adapun penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang, menurut Irma Adelman dan Cynthia Thaf Morris ada 8 sebab yaitu:

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita.
2. Inflasi, dimana pendapatan bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang.

3. Ketidakmerataan pembangunan antar wilayah.
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal, sehingga persentase pendapatan modal dari harta tambahan nilai lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.
5. Rendahnya mobilitas sosial.
6. Pelaksanaan kebijakan-kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan harga barang hasil industri adalah usaha untuk usaha-usaha golongan kapitalis.
7. Memburuknya nilai tukar dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidakelestarian permintaan negara-negara terhadap barang-barang ekspor NSB.
8. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

2.1.5 Infrastruktur

Menurut Permanasari & Maya (2021) infrastruktur berasal dari bahasa Perancis *infra* yang berarti di bawah dan *structure* yang mengacu pada suatu persetujuan terkait dan hubungan antara bagian-bagian atau unsur-unsur dari suatu yang kompleks. Infrastruktur adalah seluruh struktur dan fasilitas dasar, baik fisik ataupun non fisik tujuannya untuk melengkapi keperluan dasar masyarakat pada lingkungan sosial dan ekonomi.

Sedangkan menurut Mankiw (dalam Permanasari & Maya 2021) mendefinisikan infrastruktur merupakan bentuk modal publik (*public capital*)

yang meliputi jalan umum, jembatan, sistem saluran pembuangan, serta lainnya, selaku investasi yang diadakan oleh pemerintah karena hal tersebut menjadi salah satu faktor yang akan menyambungkan satu tempat ke tempat lain sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu tonggak utama dalam kemajuan suatu daerah karena diharapkan mampu mendukung segala bentuk kegiatan/aktivitas masyarakat di berbagai sektor kehidupan seperti perekonomian, pariwisata, pertanian, industri dan masih banyak lagi. Terbatasnya anggaran yang dimiliki daerah menghambat pembangunan infrastruktur yang mendukung potensi yang dimiliki daerah tersebut. Dalam rangka mendukung pengembangan potensi yang dimiliki daerah melalui pembangunan infrastruktur, maka Pemerintah Pusat memberikan dana dengan skema yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 21/PRT/M/2017 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dana Alokasi Khusus infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dari pemerintahan pusat yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan prasarana dan sarana infrastruktur masyarakat yang belum mencapai standar pelayanan minimal dan norma standar pedoman dan kriteria atau untuk mendorong percepatan pembangunan infrastrukturnya.

2.1.5.1 Macam-Macam Bidang dalam Dana Alokasi Infrastuktur

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 21/PRT/M/2017, dana alokasi khusus Infrastruktur yang dikeluarkan oleh pemerintah meliputi 5 (lima) bidang, yaitu:

1. Bidang Irigasi
2. Bidang Jalan dan Transportasi
3. Bidang Air Minum
4. Bidang Sanitasi
5. Bidang Perumahan dan Permukiman

2.1.5.2 Manfaat Pembangunan Infrastruktur

Besarnya faktor infrastruktur yang dibangun mengakibatkan begitu banyak kegunaannya, khususnya dalam menopang pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Menurut Mulyo (2018) sedikitnya ada beberapa manfaat infrastuktur diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan hubungan antar wilayah atau negara.
2. Menambah tingkat produktivitas suatu negara sehingga menambah pendapatan.
3. Meingkatkan efisiensi alam alokasi sumber daya.
4. Akan lebih mempercepat pemerataan pembangunan suatu wilayah atau negara.
5. Meningkatkan daya tarik investasi baru yang masuk ke wilayah atau daerah dan negara yang memiliki infrastruktur yang lengkap.

2.1.6 Elastisitas

Elastisitas didefinisikan sebagai derajat kepekaan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi lain. Menurut Nicholson (1995) (dalam Budi, 2009). Elastisitas merupakan ukuran persentase perubahan pada satu variabel yang disebabkan oleh perubahan satu variabel lain. Ukuran yang dipakai untuk mengukur derajat kepekaan digunakan rasio/perbandingan persentase perubahan kuantitas barang atau jasa yang diminta atau barang yang ditawarkan dengan persentase faktor-faktor yang menyebabkan kuantitas barang atau jasa tersebut berubah. Adapun kriteria pengelompokan elastisitas adalah sebagai berikut:

1. Elastis $\epsilon > 1$ artinya bersifat elastis apabila terdapat perubahan rata-rata lama sekolah, gini ratio, dan infrastruktur 1% akan mempengaruhi perubahan kemiskinan ekstrem sebanyak lebih dari 1%.
2. Elastis Sempurna $\epsilon = \infty$ (tak terhingga) artinya apabila terjadi perubahan rata-rata lama sekolah, gini ratio, dan infrastruktur sebanyak 1% maka elastisitas kemiskinan ekstrem akan berubah senilai tak terbatas (∞).
3. Unit Elastis $\epsilon = 1$ artinya apabila terjadi rata-rata lama sekolah, gini ratio, dan infrastruktur sebanyak 1% maka akan terjadi perubahan kemiskinan ekstrem sebanyak 1%.
4. Inelastis $\epsilon < 1$ artinya apabila terjadi perubahan rata-rata lama sekolah, gini ratio, dan infrastruktur sebanyak 1% maka terjadi perubahan kemiskinan ekstrem sebanyak kurang dari 1%.

5. Inelastis Sempurna $\varepsilon = 0$ artinya apabila terjadi perubahan rata-rata lama sekolah, gini ratio, dan infrastruktur sebanyak 1% maka kemiskinan ekstrem akan tetap atau tidak mengalami perubahan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pendukung penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Diynta Rahmawati, Dr. Asnita Frida Sebayang (2023), Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Provinsi terhadap Kemiskinan Ekstrem	Jumlah Penduduk	Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum	Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan Ekstrem di Indonesia.	Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis (JRIBB) Volume 3, No. 2, Desember 2023, e-ISSN 2798-639X p-ISSN 2808-3024
2	Lestari, I.P., Robiani, B., Sukanto, S. (2023) Ketimpangan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan Ekstrem Di Indonesia	Gini ratio	Pertumbuhan ekonomi	Ketimpangan dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel kontrol tidak berpengaruh terhadap perubahan kemiskinan Ekstrem Indonesia.	<i>Jurnal Ekombis Review, Vol. 11 No. 2 Juli 2023 page: 1739–1752</i> / 1739 ISSN: 2338-8412 e-ISSN : 2716-4411
3	Pradipta, S. A., & Dewi, R. M. (2020) Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah dan	Rata-rata lama sekolah	Pengangguran	Secara parsial Rata-Rata Lama Sekolah tidak, sedangkan pengangguran Terbuka berpengaruh	Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE) Volume 08 Nomor 03

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan			signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten	Tahun 2020, 109 -115
4	Endrawati, D., Nujum, S., & Selong, A. (2023) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Gini dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Indonesia 2017-2022	Gini Rasio	Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia	Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan, sedangkan Rasio gini berpengaruh positif signifikan dan IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia	Jurnal Pendidikan Tambusai Halaman 20144-20151 Volume 7 Nomor 3 Tahun 2023 ISSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097 (online)
5	Muhamad Azis Maulana, Aan Julia (2022), Pengaruh Indeks Pendidikan, Gini Rasio, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan Perkapita terhadap Tingkat Kemiskinan di Enam Provinsi Indonesia Tahun 2015-2019	Gini Rasio, Jumlah Penduduk	Pengaruh Indeks Pendidikan, Pendapatan Perkapita	Gini rasio berpengaruh positif signifikan, dan indeks pendidikan serta jumlah penduduk berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan pendapatan perkapita tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia	Bandung Conference Series: Economics Studies Volume 2, No.1, Tahun 2022, Hal: 17-24 ISSN: 2828-2558
6	Andrianus, F., & Alfatih, K. (2023) Pengaruh Infrastruktur terhadap Kemiskinan dengan Menggunakan Data Panel 34 Provinsi di Indonesia.	Infrastruktur	Rata-rata lama sekolah, gini ratio, jumlah penduduk	Infrastruktur berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia	<i>Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis</i> , Vol.5,No.1(2023) 56-62 e-ISSN 2714-8491
7	Hidayat, A. Y., & Azhar, Z. (2022). Analisis	Infrastruktur	Kesehatan, pendidikan	Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan	Jurnal Kajian Ekonomi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia			dan Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh negatif signifikan, sedangkan Pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia	dan Pembangunan, 4(1), 65-74.
8	Monoarfa et.,al (2022) Analisis pengaruh infrastruktur pelayanan dasar terhadap kemiskinan di kota kotamobagu	Infrastruktur		Variabel Infrastruktur tidak berpengaruh terhadap kemiskinan	<i>Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol 23. No 3 (2022)</i>
9	Nugroho, A., & Rochaida, E. (2022). Pengaruh PDRB dan rata-rata lama sekolah terhadap kemiskinan di wilayah kota.	Rata Rata Lama Sekolah	PDRB	Produk Domestik Regional Bruto dan Rata-rata Lama Sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, terhadap kemiskinan.	<i>Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarna (JIEM) Vol 7 No 4 (2020) ISSN Online 2715-3797</i>
10	Ropikatul Hasanah, Syaparuddin, Rosmeli (2021) Pengaruh angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten /Kota di Provinsi Jambi	rata-rata lama sekolah	Pengaruh angka harapan hidup, pengeluaran perkapita	Angka harapan hidup dan pengeluaran perkapita berpengaruh signifikan, Sedangkan rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.	e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah Vol.10. No.3, September – Desember 2021 ISSN: 2303-1255
11	Muhammad Hafiz Fadhilah , Masruri Muchtar ,	Jumlah Penduduk	Tingkat Pengangguran Terbuka,	Jumlah penduduk, tingkat pengangguran	JMPKP: Jurnal Manajemen

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pardomuan Robinson Sihombing (2023), Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Indonesia		dan Pendidikan	terbuka dan rasio gini berpengaruh secara positif. Sedangkan, pendidikan berpengaruh secara negatif terhadap kemiskinan di Indonesia.	Publik dan Kebijakan Publik Volume 5 Nomor 1, Maret 2023. SSN Print : 2685-7499 ISSN Online : 2745-8660
12	Affan Bagus Santoso, Eni Setyowati (2023) Analisis Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021	Jumlah Penduduk, Rata-Rata Lama Sekolah,	Produk Domestik Regional Bruto, Angka Harapan Hidup, Pengangguran	Produk Domestik Bruto (PDRB) dan Pengangguran berpengaruh signifikan, sedangkan Jumlah Penduduk, Angka Harapan Hidup, RLS tidak berpengaruh signifikan pada kemiskinan Provinsi Jawa Barat	JURNAL EKONOMI DAN BISNIS-VOL.21.NO.2(2023)
13	Putra, K. A. W. S., & Yasa, G. W. M. (2021). Pengaruh Infrastruktur dan Pendidikan terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.	Infrastruktur	pendidikan	Infrastruktur dan pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.	<i>E-JURNAL EKONOMI PEMBANG UNAN UNIVERSITAS UDAYANA Vol. 10 No 3 MARET ISSN 2303-017</i>
14	Lendentariang, D., Engka, D. S., & Tolosang, K. D. (2019). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di	Jumlah penduduk	Pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran	variabel pertumbuhan ekonomi tidak memberikan pengaruh yang signifikan, sedangkan tingkat pengangguran dan jumlah penduduk memberikan pengaruh yang	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 19 No. 02 Tahun 2019

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kabupaten Kepulauan Sangihe.			signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten kepulauan Sangihe	
15	Kevin, A. V., Bhinadi, A., & Syari'udin, A. (2022). Pengaruh Pdrb, Angka Harapan Hidup, Dan Rata Rata Lama Sekolah terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2021.	Rata-rata lama sekolah	PDRB, angka harapan hidup	PDRB berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan Angka Harapan Hidup, dan Rata Rata Lama Sekolah berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemiskinan di kabupaten/kota provinsi jawa tengah.	<i>SIBATIK JOURNAL / Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan, VOLUME 12(2021) ISSN 2809-8544</i>

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Hubungan Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Kemiskinan Ekstrem

Menurut Todaro (2000), semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin cepat pula peningkatan penghasilan yang diharapkannya. Dengan meningkatnya penghasilan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di suatu negara. Seseorang yang mengenyam pendidikan yang lebih lama biasanya memiliki akses yang lebih besar untuk mendapat pekerjaan dengan bayaran lebih tinggi, dibandingkan dengan seseorang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Akan lebih sulit mendapatkan pekerjaan dan secara tidak langsung tidak akan menerima pendapatan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, maka akan menaikkan tingkat kemiskinan bahkan kemiskinan ekstrem. Melalui pendidikan yang memadai, penduduk miskin ekstrem akan mendapat kesempatan yang lebih baik untuk keluar dari status miskin di masa depan.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Kevin, & Syari'udin (2022) dan Nugroho & Rochaida (2022) rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Artinya ketika seseorang menempuh pendidikan lebih lama maka daya berfikirnya akan semakin luas dan lebih banyak peluang untuk mendapatkan pekerjaan sehingga bisa keluar dari kemiskinan yang akan mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia.

2.3.2 Hubungan Gini Ratio terhadap Kemiskinan Ekstrem

Kesenjangan Pendapatan akan menyebabkan kondisi kemiskinan semakin parah atau bisa dikatakan kesenjangan dalam bentuk kemiskinan. Salah satu indikator yang dalam mengukur ketimpangan yaitu dapat menggunakan gini ratio. Muta'ali (2015) menjelaskan bahwa nilai gini ratio berkisar antara 0 sampai dengan 1 yang mana jika nilai gini ratio semakin mendekati 0 maka distribusi pendapatan terjadi pemerataan. Sebaliknya, jika nilai gini ratio semakin mendekati 1 maka distribusi pendapatan semakin terjadi ketimpangan. Namun dengan demikian jika angka gini ratio menurun maka akan dapat menekan angka kemiskinan di Indonesia.

Merujuk pada hasil penelitian sebelumnya menurut Maulana, & Aan Julia (2022), Endrawati, et. Al., (2023), dan Muta'ali (2015) menunjukkan gini rasio berpengaruh positif signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Artinya jika angka gini ratio menunjukkan kenaikan maka distribusi pendapatan semakin terjadi ketimpangan. Dengan besarnya ketimpangan akan dapat menyebabkan naiknya tingkat kemiskinan.

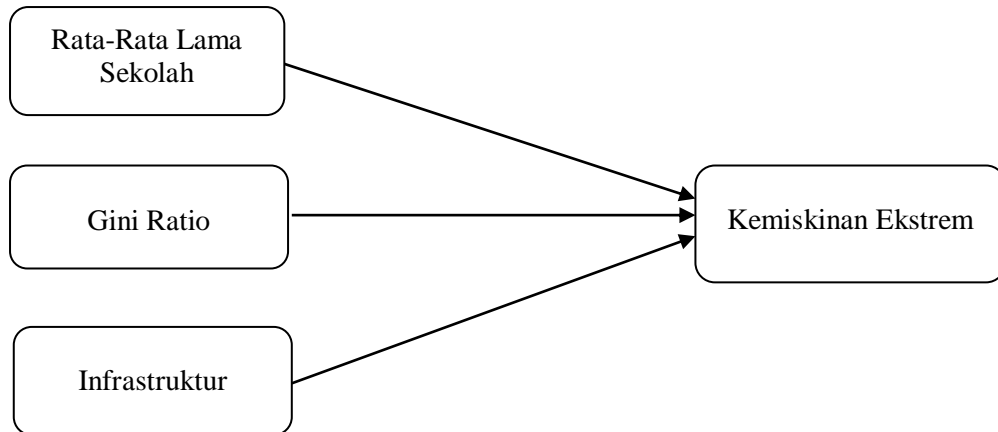
2.3.3 Hubungan Infrastruktur terhadap Kemiskinan Ekstrem

Menurut Ikhsan (dalam Wahyuni, 2009) menyatakan bahwa dari sisi langsung pembangunan infrastruktur itu sendiri adalah aktivitas produksi untuk menciptakan, menghasilkan kesempatan untuk kerja. Secara tidak langsung, dari adanya infrastruktur yang dapat mempengaruhi perkembangan bidang-bidang ekonomi lainnya, terutama pada infrastruktur dasar yang menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada infrastruktur lainnya. Dengan perbaikan infrastruktur dapat mampu meningkatkan keadaan pembangunan yang bisa digunakan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan seseorang bisa mendapatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan.

Infrastruktur yang berkualitas secara efektif dan efisien akan mendorong kegiatan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Daerah dengan ketersediaan infrastruktur yang lebih memadai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan tingkat kemiskinan yang lebih rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra, et. al., (2021), Andrianus, et. al., (2023) menunjukkan hasil yaitu variabel infrastruktur berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, artinya ketika pengadaan infrastruktur bertambah maka akan dapat menurunkan kemiskinan.

Berikut ini gambar kerangka mengenai hubungan Rata-Rata Lama Sekolah, Gini Ratio, dan Infrastruktur terhadap Kemiskinan Ekstrem di Indonesia:



Gambar 2.3 Bagan Kerangka Pemikiran.

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2016), hipotesis didefinisikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Diduga rata-rata lama sekolah dan infrastruktur secara parsial berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia, sedangkan gini ratio secara parsial berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia.
2. Diduga rata-rata lama sekolah, gini ratio, dan infrastruktur secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan ekstrem di Indonesia.